

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha keras melakukan pembangunan disegala sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek yang diperlukan agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Selain dukungan dari masyarakat, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan, biaya yang akan diperlukan untuk membantu melancarkan pembangunan negara. Salah satu sumber biaya yang bisa didapatkan pemerintah adalah dari pemungutan pajak.

Pemungutan pajak sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Karena pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan untuk membuka lapangan pekerjaan baru sehingga uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran, semakin tinggi pajak yang diperoleh dapat mengurangi beban negara dan dapat memperlancar pembangunan untuk negara Indonesia.

Untuk membantu pembangunan ekonomi, pajak yang dipungut adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dibawah Kementerian Keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola

Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak kendaraan bermotor. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial bagi Pendapatan Asli Daerah sendiri berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor diyakini sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat dari pengguna kendaraan bermotor yang jumlahnya terus meningkat. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua yang kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang bertujuan untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Kantor UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Padang merupakan bagian dari UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah yang bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat dalam hal yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor. Samsat juga disebut satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melakukan pemungutan pajak provinsi dan badan usaha yang berada dalam satu kesatuan.

Dalam hal mengelola keuangan daerah dalam hal pemungutan pajak, tentu diperlukan yang namanya pencatatan pendapatan. Pencatatan harus mencatat semua pendapatan dengan sangat tepat dan rinci supaya lebih memudahkan melihat pendapatan yang diterima. Pencatatan pendapatan juga penting untuk menjadi bukti atas terjadinya setiap transaksi, dan juga bisa menghindari kesalahan atau penyalahgunaan dana perusahaan. Pencatatan juga tentunya sangat membantu memberikan gambaran atau acuan catatan transaksi khususnya untuk penerimaan pajak.

Sebagai sebuah bagian dari Badan Pendapatan Daerah tentu harus membuat suatu pencatatan dan pelaporan terhadap pendapatan yang diperoleh dari semua penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam mencatat dan melaporkan pendapatan (laporan keuangan) tersebut harus di proses dengan teliti dan cermat sehingga dibutuhkan metode atau cara yang tepat.

Dengan adanya pencatatan yang rinci, semua pendapatan yang diterima bisa tergambar dengan jelas sehingga sangat membantu untuk penerimaan pajak yang dikelola oleh Samsat. Semua uang dari pembayaran pajak yang masuk ke kas daerah,

tentu dibutuhkan pencatatan pendapatan, sehingga badan pendapatan daerah bisa lebih mudah mengelola setiap pendapatan daerah yang masuk ke kas daerah terkhusus pendapatan pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Apa saja sumber-sumber penerimaan yang ada pada UPTD Samsat Padang?
2. Bagaimana Prosedur Pencatatan dan Pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB pada UPTD Samsat Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

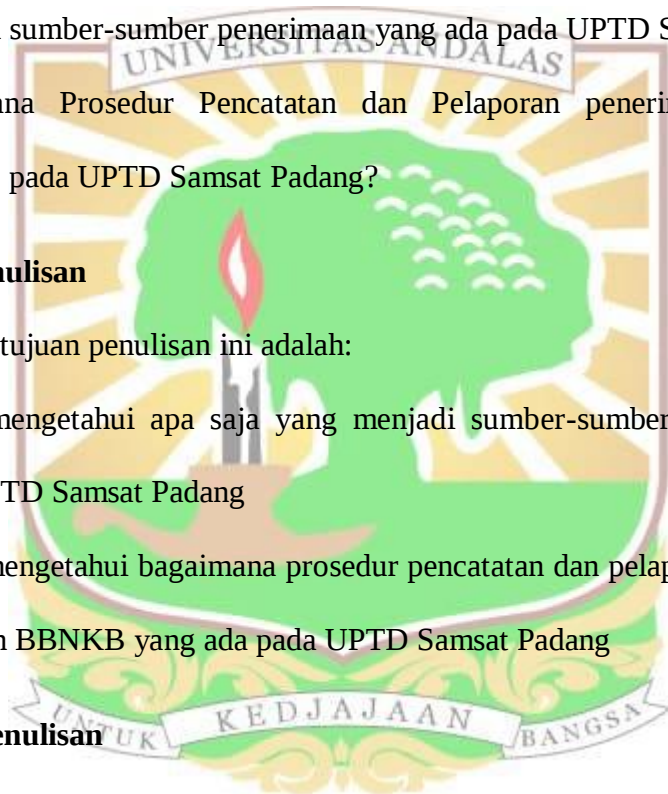
Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber-sumber penerimaan kas pada UPTD Samsat Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan dan pelaporan penerimaan PKB dan BBNKB yang ada pada UPTD Samsat Padang

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini yaitu:

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan PKB dan BBNKB UPTD Samsat Padang
 - b. Memahami situasi di dunia kerja sesungguhnya.



- c. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir.

2. Bagi Universitas

- a. Menciptakan lulusan yang memiliki keahlian professional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
- b. Untuk meningkatkan kerjasama dengan dinas/perusahaan tempat magang dan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas pada saat selesai menyelesaikan studinya dengan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini maka akan dipaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang apa saja teori yang bersangkutan tentang Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan PKB dan BBNKB kantor UPTD Samsat Kota Padang.

BAB III GAMBARAN UMUM SAMSAT KOTA PADANG

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Gambaran umum Kantor Samsat Kota Padang mengenai dasar hukum pembentukan Kantor Samsat Kota Padang, visi misi tujuan dan sasaran tugas pokok fungsi dan kewenangan dan struktur organisasi Kantor Samsat Kota Padang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penguraian tentang kajian yang lebih mendalam dari hasil pembahasan yang ditemukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan dan saran-saran yang sesuai dalam pemaparan suatu kesimpulan.

